

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta, Sinar Grafika)

Andi Hamzah, 2004. *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Darwin Prinst, 2002. *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta).

Ermansjah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.

Marwan Effendy, 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional: Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Referensi (GP Press Group).

Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mahrus Ali, 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, Cetk Pertama, UII Press Yogyakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Y.ogyakarta.

M. Solly Lubis, 2001. *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju).

Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani dan Dolli Setiawan Ritonga, 2018. *Korupsi Kerugian Keuangan negara di BUMN* (Yogyakarta, UII Press)

Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cetakan kesembilan, (Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, et.all, 1997 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 2/Pid. Pra/2021/ PN Tte.

SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 6 Rumusan Hukum Kamar Pidana.

Surat Tuntutan Nomor: REG.PERKARA : PDS-05/Q.2.14/Ft.1/05/2019 tanggal 23 Agustus 2021

Sumber Lain :

Mhd. Din, 2018, Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Syiah Kuala Law. Vol, 2, No. 3, Desember.

Mahdalena Deisi Rampengan, 2014, *Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lex et Societatis, Vol. II, No. 3, April.

Fidel Angwarmasse, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hukum Unsrat. Vol, 22, No. 7, Agustus 2016.